

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arifin, Syamsul, dan Ridho Mubarak. *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa*. Medan: Universitas Medan Area, 2016.
- Asy'ari, Hasyim. *Dinamika Negara Hukum: Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Asy'ari, Hasyim. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Digdo, Jarot, et.al. *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Farida, Elfia. *Hak Atas Pekerjaan & Hak Dalam Bekerja Bagi Pekerja Migran Indonesia*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2022.
- Mahkamah Konstitusi. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi*. Surabaya: Pustaka Asmara, 2023.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Romli, et al. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Sutrisno, Tri, Sukmariningsih, Retno Mawarini Sukmariningsih, dan Mashari. *Reformulasi Kedudukan Polri dalam Mewujudkan Good Governance*. Indramayu: Penerbit Adab, 2025.

Jurnal Penelitian

Al Anshori, Muhammad Alfian, dan Bambang Widarto. "Analisis Hukum Peran Brigade Mobil (Brimob) dalam Penanganan Kelompok Separatis Papua." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3, 2025. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1614>.

Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *ASAS* 8, no. 2, 2016. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.

Irfan, Abdullah, et.al. "Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 13, no. 1, 2024. [10.14421/inright.v13i1.3574](https://doi.org/10.14421/inright.v13i1.3574).

Nadine Putri, Salsabila, et.al. "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 2, 2022. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/index>.

Nugraha, Agung, Agus Mulyana, dan Achmad Iriyadi. "Peranan Brigade Mobile dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia tahun 1946-1949." *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 7, no. 1, 2018. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i1.11924>.

Nur Cahyo, M. Rozi, Danu Suryani, dan Hidayat Rumatiga. "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Brimob Dalam Pelaksanaan Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 1, 2025. <https://doi.org/10.6679/by3zb498>.

Pamungkas, Ghozali Bintang, dan Sudarto. "Perlindungan HAM Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2, No. 1, 2024.

Parmadi, I Gede Bayu, dan Adi Nur Rohman. "Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Situasi Tekanan Tugas: Studi Kasus Kompol Cosmas." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9, 2025. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.794>.

- Patiran, Gurnald, Chairul Muriman Setyabudi, dan Vita Mayastinasari. "To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22481>.
- Perdana, Indra. "Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara." *Warta Dharmawangsa*, no. 47, 2016. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i47.230>.
- Purwanto, Bimo Gadang, Mulyadi, dan R. Djuniarsono. "Tugas dan Fungsi Korp Brimob Polri dalam Melaksanakan dan Menggerakkan Anggotanya Sebagai Satuan Pamungkas Polri (Striking Force) Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002." *Karimah Tauhid* 3, no. 3, 2024. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12495>.
- Putri, Rizka Naine, Herviani, Safina, et.al. "Teori Resolusi Konflik: Jenis-Jenis Konflik, Teori Kebutuhan Manusia (Human Needs Theory), Teori Identitas (Identity Theory), dan Managemen Konflik." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1888>.
- Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1, 2017. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>.
- Sianturi, Binsar Hatorangan, dan Margaretha Hanita. "Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1, 2024. <https://orcid.org/0009-0005-0528-1635>.
- Syarif, Dandel Lukman, Maryano Maryano, dan Kristiawanto. "Analisis Yuridis Normatif Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hukum Di Papua Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1, 2025.
- Tahir, Muh, dan Nurmiati Muhiddin. "Analisis Peran Batalyon B Pelopor Brimob Parepare dalam Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi di Wilayah Konflik Bersenjata Papua." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 1, 2024.
- Wardana, Adi Kusuma, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, dan Yayat Suharyat. "Manajemen Konflik." *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1, 2024. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>.

Yuliansa, Dobi, et.al. "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1, 2024. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888>.

Skripsi/Tesis

Amirullah. "Penegakan Hukum terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

Prasojo, Liando Azam. "Penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Organisasi Terorisme dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Sinaga, Marta Ulina. "Konflik Separatisme Papua dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomasi Indonesia-Australia." Pekanbaru: Universitas Riau, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Polri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusi Peradilan Umum bagi Anggota Polri.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Sumber Lainnya :

Concern Worldwide. "What is a humanitarian crisis." <https://www.concern.net/news/what-is-a-humanitarian-crisis> (diakses 9 Maret 2026).

KBBI. "Perlindungan." <https://kbbi.web.id/perlindungan> (diakses 16 Desember 2025).

Kementerian Pertahanan. "HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah." <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html> (diakses 12 Juni 2025).

Suryanto. (2024). *Teori-teori Hak Asasi Manusia: Indonesia Menganut Yang Mana?*. Literasi Hukum Indonesia. <https://literasihukum.com/teori-teori-hak-asasi-manusia-indonesia-menganut-yang-mana/>. Diakses 19 Januari 2024.

Bharatu Zaid Faizal Akbar, diwawancarai oleh Penulis , 13 Februari 2026, *Perlindungan Hukum dan HAM bagi Korps Brimob di Papua*.

Bharada M. Rendy Danuarta Pratama, diwawancarai oleh Penulis , 13 Februari 2026, *Perlindungan Hukum dan HAM bagi Korps Brimob di Papua*.

Bharada Fernanda Ardi Prayoga, diwawancarai oleh Penulis , 13 Februari 2026, *Perlindungan Hukum dan HAM bagi Korps Brimob di Papua*.

UN Basic Principles on the Role of Law Enforcement Officials

UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials